

OPTIMALISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENERBITAN SKTS (SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA) BAGI PENDUDUK MIGRAN DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Sandhi Rivaldi

NPP. 29.1700

Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Program Studi

Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: sandhirivaldhi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The city of Ternate is one area that is a destination for migrants because of its strategic location and has a strong enough attraction for migrants. As a form of administration, the government makes efforts to collect data on the migrant population or migrant population. The data collection is carried out by requiring the issuance of a Temporary Residence Certificate (SKTS) for migrant residents/non-permanent residents. Temporary Residence Certificate (SKTS) is a program provided by the Department of Population and Civil Registration in providing services to issue Temporary Residence Certificates (SKTS) for migrant residents in an area in order to create an orderly administrative society. **Purpose:** This research is to analyze the optimization of the Population and Civil Registration Office in the issuance of temporary residence certificates for migrant residents in Ternate City. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with two approaches, namely quantitative approach and qualitative approach. Sources of data obtained from primary data sources and secondary data sources. **Result:** The results of this study indicate that the success of the Ternate City Population and Civil Registration Office in managing the issuance of Temporary Residence Certificates. **Conclusion:** Based on the results of the study, the success of the Ternate City Population and Civil Registration Office in managing the issuance of Temporary Residence Certificates, Non-Permanent Resident Letters, and Migrant Population Administration can be said to have been optimal based on the three dimensions described because the migrant population in the City of Ternate is sought to be recorded at the Population Service. and Civil Registration of Ternate City in order to achieve Orderly Population Administration.

Keywords: Optimization, SKTS (temporary residence certificate), migrants

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Ternate merupakan salah satu daerah yang destinasi para migran karena keberadaannya yang strategis dan mempunyai daya tarik yang cukup kuat bagi para migran. Sebagai bentuk administrasi pemerintah melakukan upaya pendataan terhadap penduduk migran atau penduduk pendatang. Pendataan tersebut dilakukan dengan mewajibkan pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi penduduk migran/penduduk non permanen. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) merupakan sebuah program yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi penduduk pendatang di suatu daerah dalam rangka menciptakan masyarakat tertib administrasi. **Tujuan:** untuk menganalisis Optimalisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan surat keterangan tinggal sementara bagi penduduk migran di Kota Ternate. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. **Hasil:** Hasil Penelitian ini menunjukkan Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dalam mengelola penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara **Kesimpulan:** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate berhasil dalam mengelola penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Penduduk Non Permanen, dan Administrasi Kependudukan Penduduk Migran dapat dikatakan sudah optimal berdasarkan tiga dimensi yang dijelaskan karena penduduk migran di Kota Ternate diupayakan terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate demi tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci: Optimalisasi, SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara, Migran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surat Keterangan Tinggal Sementara merupakan suatu identitas bagi penduduk non permanen. Selain itu, manfaat dari Surat Keterangan Tinggal Sementara bagi penduduk non permanen contohnya seperti melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pertolongan ketika mendapatkan musibah. Selain itu, memudahkan kepolisian dalam mengambil data penduduk non permanen untuk meminimalisir kasus terorisme yang sedang marak di Indonesia. Akan tetapi, untuk mendapatkan Surat Keterangan Tinggal Sementara membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya Surat Keterangan Tinggal Sementara mulai berkurang. Sebagai bentuk administrasi pemerintah melakukan upaya pendataan terhadap penduduk migran atau penduduk pendatang. Pendataan tersebut dilakukan dengan mewajibkan pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi penduduk migran/ penduduk non permanen. SKTS adalah dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang datang dari luar daerah dengan maksud bekerja/ menempuh pendidikan dan bertempat tinggal di Kota Ternate tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Kota Ternate. SKTS adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada penduduk tinggal sementara sebagai bukti diri bahwa telah terdaftar sebagai penduduk tinggal sementara. (Zudan & Endar 2019)

Migrasi merupakan bentuk perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain dimana daerah tersebut surah menjadi tujuan karena beberapa aspek yang dikira memenuhi oleh penduduk untuk melakukan migrasi. Migrasi terjadi biasanya dikarenakan beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi dimana jadi bagian dari mata pencaharian, faktor iklim yang sudah tidak sesuai, konflik yang terjadi di daerah karena kerusuhan, dan faktor SARA (suku, ras, dan agama) yang menjadi perbedaan ideology yang terjadi di daerah tersebut. (Sita Dewi : 2015)

Kota Ternate merupakan salah satu daerah yang destinasi para migrasi karena keberadaannya yang strategis dan mempunyai daya tarik yang cukup kuat bagi para migran. Hal ini sama seperti daerah-daerah lain di kawasan Indonesia yang migran datang mencari peluang di bidang pendidikan dan ekonomi dalam meningkatkan kehidupannya. Migrasi yang terjadi di Ternate kebanyakan adalah migrasi internal (Migrasi Nasional). Migrasi internal (Migrasi Nasional) salah satunya adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Faktor penyebab terjadinya migrasi ke Ternate adalah daya tarik Kota Ternate yaitu upah tenaga kerja yang lebih tinggi dari daerah asal, mempunyai universitas yang memadai, jumlah pekerjaan yang banyak, dan fasilitas kehidupan yang memadai. Selain itu, faktor pendorong para migran pindah ke Ternate yaitu lahan pekerjaan semakin sempit, rendahnya upah, kurangnya fasilitas kehidupan di daerah asal, kegiatan pertanian hanya musiman, dan adanya keinginan para migran untuk melanjutkan kuliah di universitas yang ada di Kote Ternate. (Arikunto : 2010)

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Jumlah penduduk pendatang di Kota Ternate pada tahun 2019 sebanyak 678 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 778 jiwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, pendatang yang datang bertujuan baik mengenyam Pendidikan, bekerja, maupun berwisata. Berdasarkan hasil penelitian Robo (2019:1) yang berjudul “Analisis Migrasi Penduduk Terhadap Tingkat Pendapatan Ekonomi Masyarakat Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan” menunjukkan bahwa umumnya migrasi penduduk di kota ternate berasal dari luar daerah diantaranya Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Ambon, dan Makassar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi di daerah asal kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari hal ini juga mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi keluar dari daerah asal menuju ke daerah tujuan untuk mencari pekerjaan yang layak dan bisa melanjutkan pendidikan anak. Selain itu, perkawinan juga mempengaruhi penduduk untuk bermigrasi ke tempat yang memiliki sarana yang memadai misalnya fasilitas pendidikan, toko-toko, dan pelabuhan.

Sebagian dari para pendatang tersebut ada yang pindah dan menetap di Kota Ternate, namun ada juga yang tidak menetap. Mereka yang tidak menetap disebut penduduk non permanen atau penduduk sementara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen, Penduduk Non permanen adalah penduduk warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP- elektronik yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap. Penduduk non permanen biasanya tinggal di rumah kos atau kontrakan dan biasanya mereka akan kembali ke daerah asal dalam periode 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam pendataan pembuatan berkas surat keterangan penduduk non permanen (SKTS), kecuali untuk pelajar dan mahasiswa dapat diperpanjang sampai selesai pendidikan dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi. Salah satu contoh penduduk migran sementara atau penduduk non permanen adalah mahasiswa yang berasal dari kabupaten luar kota ternate. Adapun juga pegawai yang tidak mau jadi penduduk kota ternate tapi belum memiliki dokumen Surat Keterangan Tinggal Sementara / Penduduk Non Permanen (SKTS).

Dari penjelasan yang peneliti kemukakan diatas, peneliti menemukan permasalahan yang terjadi di Kota Ternate yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran dalam melakukan pendaftaran penduduk.
- b. Rendahnya pendataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi penduduk migran yang datang.
- c. Masih banyak penduduk migran yang belum mempunyai dokumen non permanen

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, Faizaldi Ichsan Sudarsono dan Budi Puspo Priyadi (2019) dengan judul: Analisis Rendahnya Pembuatan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) Pada Mahasiswa (Studi Di Kecamatan Tembalang). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang memiliki pendekatan deskriptif dengan hasil penelitian Dilihat dari aspek tujuan dan peraturan program, aspek sosialisasi program, aspek pelaksanaan program, dan aspek pemantauan program. namun pembuatannya masih rendah dan belum efektif.

Tamrin Robo, Rizky Nuri Amelia, dan Sahdia Robo (2019) dengan judul: Analisis Migrasi Penduduk Terhadap Tingkat Pendapatan Ekonomi Masyarakat Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang memiliki pendekatan deskriptif dan hasil penelitiannya Tingkat pendapatan migrasi penduduk di Kecamatan Kota Ternate Selatan mengalami peningkatan dibandingkan daerah asal dan faktor ekonomi merupakan faktor utama penduduk untuk bermigrasi dari daerah asal ke daerah tujuan untuk mencari pekerjaan yang layak. (Jogiyanto : 2018)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Optimalisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) bagi penduduk migran di Kota Ternate. Pada kedua penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa memiliki dua fokus yang berbeda-beda di setiap penelitiannya. Dalam penelitian penulis kali ini, penulis akan menyatukan kedua fokus tersebut menjadi satu kesatuan dalam judul penulis.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan dokumen surat keterangan tinggal sementara bagi penduduk migran di Kota Ternate. menganalisis hambatan-hambatan dalam penerbitan surat keterangan tinggal sementara bagi penduduk migran serta mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pelayanan penerbitan surat keterangan tinggal sementara bagi penduduk migran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. (Muri : 2014) Mengingat bahwa

penelitian ini

bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana optimalisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan SKTS (surat keterangan tinggal sementara) bagi penduduk migran di Kota Ternate maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. (Sugiyono : 2017)

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bisa diperoleh melalui informan. (Creswell : 2016) Dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian, maka dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik "purposive sampling". Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti mengadopsi dari Miles dan Huberman (2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tujuan

Dalam pencapaian tujuan dalam optimalnya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Migran/ Penduduk Non Permanen terutama bagi penerbitan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) harus melakukan beberapa upaya yang harus dilakukan seperti:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate telah berusaha memberikan pelayanan maksimal dengan cara menetapkan waktu dalam penerbitan Dokumen Kependudukan, kebijakan yang diambil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Kebijakan tersebut diambil dengan tujuan membuat masyarakat nyaman dan tidak harus menunggu lama dalam penerbitan dokumen kependudukan khususnya bagi Penduduk Migran/ Penduduk Non Permanen.
2. Kegiatan Jemput Bola yang bertujuan mendata penduduk Migran di berbagai tempat sekaligus mengecek kelengkapan Dokumen Kependudukan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan.
3. Sosialisasi, berbagai permasalahan yang timbul karena tidak memiliki dokumen kependudukan menjadi perhatian khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Hal ini perlu dilakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat. Sosialisasi ini dimaksudkan bagaimana menyadarkan dan memotivasi masyarakat akan pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa salah satu kendala penduduk pendatang/ penduduk migran belum melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni keadaan masih pandemi covid-19 dan jarak serta kurangnya kesadaran masyarakat/ penduduk migran atau penduduk non permanen terhadap kepemilikan dokumen kependudukan yang sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya tertib administrasi kependudukan.

Tujuan dari Optimalnya Penerbitan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) yaitu terkhusus pada Penduduk Migran Lokal atau Penduduk Migran Nasional. Dimana Penduduk Migran Nasional merupakan perpindahan penduduk dari suatu Daerah ke Daerah yang dituju dalam skala Nasional atau dalam Negeri. Peneliti disini lebih membahas tentang Penduduk Migran dalam skala Provinsi yaitu Penduduk dari Kabupaten atau luar Kota yang datang ke Kota Ternate lalu belum terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dan yang sudah di data agar Penduduk Migran yang dimaksud tetap memiliki kelengkapan Administrasi Dokumen Kependudukan terkhususnya SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara)/ Surat Penduduk Non Permanen. (Silalahi : 2010)

3.2 Alternatif Keputusan

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate telah memiliki beberapa kebijakan yang telah dijalankan dan sesuai dari arahan Kepala Dinas bahwa Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan Peraturan yang ada seperti Peraturan Daerah maupun Peraturan Presiden. Kebijakan yang dibuat seperti Kewajiban Melaporkan diri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pada Pasal 63 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. bahwa, Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota dilaksanakan melalui tahapan :

a. Pelaporan

Pelaporan dalam hal ini yaitu sudah menjadi kewajiban masyarakat/ Penduduk Migran yang datang ke Kota Ternate untuk melakukan pelaporan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dalam rangka melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan yang sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang berlaku.

b. Verifikasi dan validasi

Verifikasi dan validasi disini ditujukan kepada Penduduk Migran yang telah mempunyai SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) lalu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut tentang keaslian maupun kebenaran apakah sudah sesuai dan akurat dengan dokumen kependudukan yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Perekaman data, dan

Perekaman data disini berupa proses perekaman data atau penginputan data bagi Penduduk Migran tentang kepemilikan Dokumen Kependudukan berupa SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara), akan selalu di data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate agar Penduduk Migran di Kota Ternate selalu terdata dan dilakukan pengecekan / validasi terhadap data tersebut.

d. Pencatatan dan Penerbitan dokumen

Pencatatan dan penerbitan dokumen bagi Penduduk Migran dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat yang taat akan tertib Administrasi Kependudukan terutama masyarakat di Kota Ternate yang melakukan proses pembuatan lalu dilakukan penerbitan dokumen yang diinginkan. Dapat diumpamakan seperti Penduduk Migran yang telah diperiksa namun belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap akan langsung diarahkan agar melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen tersebut contohnya seperti dokumen SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara).

Dari hasil observasi peneliti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dapat memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaporkan akan perpindahan ke daerah yang dituju atau ditempat asalnya, hal ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Begitu juga dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate mewajibkan Pendudukan Migran untuk segera melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelola Administrasi Penduduk Migran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate melakukan pelayanan sesuai aturan yang berlaku. (Ali, M.A. : 2014)

proses penerbitan suatu Dokumen Kependudukan yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pada Pasal 63 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu melakukan yang pertama Pelaporan, yang dimaksud ialah kewajiban masyarakat dalam melakukan pelaporan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan proses pembuatan Dokumen Kependudukan. Selanjutnya Verifikasi dan validasi data, yang dimana sudah merupakan tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mencari kebenaran atau keaslian tentang dokumen yang ingin dibuat. Berikut yaitu Perekaman Data, maksudnya ialah penginputan data yang telah diverifikasi agar tercatat dalam arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan yang terakhir yaitu Pembuatan dan Penerbitan Dokumen, dari proses yang telah dilakukan oleh masyarakat dan dirasa sesuai terdata, selanjutnya proses penerbitan dokumen dilaksanakan demi tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan terutama bagi Penduduk Migran di Kota Ternate. (Mantra : 1992)

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa salah satu kendala penduduk pendatang atau Penduduk Migran belum melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yakni jarak yang jauh antara tempat tinggal penduduk dan Dinas dan Pencatatan Sipil yang berada jauh dari tempat tinggal masyarakat serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepemilikan administrasi kependudukan. Namun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap berupaya dan berusaha mengatasi kendala untuk mencapai tujuan dan mendukung tercapainya tertib administrasi kependudukan.

3.3 Sumber Daya yang Dibatasi

Tentunya dalam melakukan suatu pelayanan sering terjadi kendala-kendala yang dialami pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bagi penduduk migran yang tidak berjalan sesuai rencana yang telah diatur, berikut solusi dari Dinas agar tercapai tujuan:

1. Ketepatan waktu dalam melakukan pendataan atau pemeriksaan penduduk migran dan waktu pelaksanaan yang tepat dalam proses pendataan sehingga berjalan dengan baik.
2. Dokumen kependudukan harus lengkap.
3. Pentingnya sosialisasi tentang Dokumen Kependudukan.
4. Dari Pihak Dinas melakukan razia Dokumen Kependudukan.
5. Jaringan Internet yang stabil agar proses pendataan penduduk berjalan lancar.
6. Menugaskan perwakilan agar melakukan pendataan Jemput Bola di daerah-daerah terpencil dimana masyarakat sulit untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hal ini merupakan solusi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dalam pencapaian tujuan agar teroptimalnya Penerbitan Dokumen Kependudukan khususnya Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)/ Surat Penduduk Non Permanen bagi Penduduk Migran. Dalam hal ini kerja sama antara Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pihak yang berwajib, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus berjalan dengan baik.

Sumber Daya Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate berjumlah 60 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 40 perempuan. Dimana dari jumlah Pegawai yang terbatas, peneliti menemukan sekitar 14 orang pegawai yang sering melakukan kegiatan Jemput Bola ke daerah-daerah yang kiranya jauh dari Kantor. Namun pegawai yang melakukan pelayanan tetap harus menetap di Kantor agar melayani Masyarakat yang melakukan Administrasi Kependudukan. Dari situ juga bahwa dari Sumber Daya Aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate cukup terbatas tapi tetap berupaya mencapai tujuan yang telah menjadi target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. (Aldila Marselli, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina. : 2016)

Pelayanan yang dilakukan diluar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kegiatan Jemput Bola dimana Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ternate melakukan Kerja sama bersama Pihak Kantor Imigrasi untuk melakukan Operasi Yustisi dalam proses pelayanan dan pendataan Penduduk Migran yang datang dan belum melakukan pelaporan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan belum atau sudah memiliki Dokumen Kependudukan seperti SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara).

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan peneliti bahwa walaupun masih kekurangan anggota dalam pelayanan, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melaksanakan segala urusan tentang Administrasi Kependudukan semaksimal mungkin. Kendala yang terjadi tetap diusahakan mendapatkan solusi dan tetap berupaya mencapai tertib Administrasi Kependudukan terutama tentang dokumen

SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) bagi Penduduk Migran.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penerbitan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) bagi Penduduk Migran di Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha dan selalu berupaya yang menjadi optimalnya/ terjadi peningkatan dalam Penerbitan SKTS dimulai dari kebijakan yang dibuat Kepala Dinas untuk mempercepat Pembuatan Penerbitan Dokumen Kependudukan, Kegiatan Jemput Bola, dan diadakan Sosialisasi rutin bagi masyarakat. Kemudian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menerapkan atau mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pada Pasal 63 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan tata cara melakukan pendaftaran yang di jelaskan kepada Masyarakat terutama bagi Penduduk Pendaftar atau Penduduk Migran. Meskipun masih terkendala atas Sumber Daya Aparatur dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tetap melaksanakan segala urusan tentang Administrasi Kependudukan semaksimal mungkin. Kendala yang terjadi tetap diusahakan mendapatkan solusi dan tetap berupaya mencapai tertib Administrasi Kependudukan terutama tentang dokumen SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) bagi Penduduk Migran.

3.4 Faktor Penghambat program Nikah Massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di Lapangan, ditemukan beberapa hambatan yang menjadi mempengaruhi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menertibkan kepemilikan surat keterangan tinggal sementara dan pelaporan kepindahan bagi penduduk migran yang datang diantaranya ialah:

1. Rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan pendaftaran penduduk

Salah satu kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menertibkan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Pendaftar di Kota Ternate ialah masyarakat enggan mengurus administrasi kependudukan mereka. Prosedur yang dirasa masyarakat terlalu berbelit-belit menyebabkan masyarakat enggan mengurus dokumen atau melakukan pendaftaran penduduk untuk melengkapi dokumen kependudukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate melakukan sosialisasi di waktu-waktu yang minim pelayanan namun waktu pelaksanaan tersebut belum tersusun dengan baik dan belum sesuai tujuan dari pelaksanaan pendaftaran penduduk.

2. Operasional prosedur yang dianggap masyarakat terlalu rumit

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan urutan yang harus dilalui oleh masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) atau Surat Penduduk Non Permanen, namun masyarakat masih merasa prosesnya terlalu rumit sehingga masyarakat enggan untuk membuat atau mengurus dokumen tersebut. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kepengurusan administrasi tidaklah rumit dalam hal ini peran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate diperlukan sehingga masyarakat mengerti betapa mudahnya mengurus dokumen administrasi kependudukan terutama dokumen yang berkaitan dengan Penduduk Migran/ Penduduk Non Permanen.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana dalam suatu organisasi, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Jika SDM dirasa kurang maka dapat menghambat tujuan organisasi. Dari hasil wawancara penulis mendapatkan informasi bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate memiliki kendala pada Sumber Daya yang masih kurang untuk melakukan pelayanan, terutama pada saat kegiatan diluar kantor yang melibatkan banyak pegawai yang diterjunkan ke lapangan.

3.5 Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat untuk menangani faktor penghambat program Nikah Massal

Berdasarkan hasil observasi wawancara serta dokumentasi yang penulis peroleh ditemukan solusi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ternate dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui dalam menertibkan Administrasi Kependudukan dari Penduduk Migran terutama dalam penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dalam mengatasi kendala tersebut adalah sosialisasi intensif dan tepat sasaran, kemudian pemasangan iklan pada papan reklame tentang manfaat kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk migran/ penduduk non permanen dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate terapkan. Serta penerimaan siswa dan mahasiswa penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate sebagai fasilitator dalam pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan, sehingga terciptana pelayanan yang cepat dan tertib.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Jumlah penduduk pendatang di Kota Ternate tidaklah sedikit, pendatang yang datang bertujuan baik mengenyam Pendidikan, bekerja, maupun berwisata. Faktanya hanya beberapa pendatang yang memiliki surat keterangan penduduk sementara, oleh karena itu perlunya pengawasan atas mobilitas penduduk yang datang ke Kota Ternate dengan pembuatan surat keterangan tinggal sementara (SKTS).

Dalam penelitian ini optimalisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan SKTS (surat keterangan tinggal sementara) bagi penduduk migran di Kota Ternate dinilai dari tiga dimensi. keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dalam mengelola penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Penduduk Non Permanen, dan Administrasi Kependudukan Penduduk Migran dapat dikatakan sudah optimal berdasarkan pada Dimensi Tujuan, Alternatif Keputusan dan Sumber Daya yang Dibatasi. Dari dimensi yang dijelaskan, Optimalisasi Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) bagi Penduduk Migran di Kota Ternate menurut

Peneliti sudah Sesuai dan berjalan baik demi mencapai Tertib Administrasi Kependudukan. (Winardi : 1999)

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

penerbitan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) bagi Penduduk Migran di Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha dan selalu berupaya yang menjadi optimalnya/ terjadi peningkatan dalam Penerbitan SKTS dimulai dari kebijakan yang dibuat Kepala Dinas untuk mempercepat Pembuatan Penerbitan Dokumen Kependudukan, Kegiatan Jemput Bola, dan diadakan Sosialisasi rutin bagi masyarakat. Kemudian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menerapkan atau mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pada Pasal 63 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan tata cara melakukan pendaftaran yang di jelaskan kepada Masyarakat terutama bagi Penduduk Pendaftar atau Penduduk Migran. Meskipun masih terkendala atas Sumber Daya Aparatur dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tetap melaksanakan segala urusan tentang Administrasi Kependudukan semaksimal mungkin. Kendala yang terjadi tetap diusahakan mendapatkan solusi dan tetap berupaya mencapai tertib Administrasi Kependudukan terutama tentang dokumen SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) bagi Penduduk Migran. (Singiresu : 2009)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai Optimalisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi Penduduk Migran di Kota Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari sampai dengan 17 Januari 2022 maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dalam mengelola penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Penduduk Non Permanen, dan Administrasi Kependudukan Penduduk Migran dapat dikatakan sudah optimal berdasarkan pada Dimensi Tujuan, Alternatif Keputusan dan Sumber Daya yang Dibatasi. Dari dimensi yang dijelaskan, Optimalisasi Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) bagi Penduduk Migran di Kota Ternate menurut Peneliti sudah Sesuai dan berjalan baik demi mencapai Tertib Administrasi Kependudukan.
2. Faktor yang menghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengoptimalan dalam kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk migran yaitu rendahnya tingkat kesadaran penduduk migran akan pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan agar dapat digunakan kedepannya dalam

mengurus administrasi dan tidak terhambat dikarenakan kurangnya ataupun tidak lengkap dokumen kependudukan mereka, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirasa masyarakat terlalu rumit serta kurangnya sumber daya manusia, dan juga masyarakat yang malas mengurus dokumen kependudukan mereka dengan beralasan jarak yang jauh dari tempat tinggal mereka.

3. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yakni:
 - Dengan mengadakan sosialisasi intensif dan tepat sasaran.
 - Pemasangan iklan pada papan reklame tentang pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk migran dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan terutama Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kota Ternate saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Teori Optimalisasi Siringoringo.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Optimalisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan SKTS (surat keterangan tinggal sementara) bagi penduduk migran.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- A. Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta : prenadamedia group. Hlm:391
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm : 172,274.
- Creswell, John W. 2016. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.Edisi ke-4 (cetakan kesatu) Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm : 267

- Jogiyanto Hartono, Kontributor : Zaki Ahmad, dkk. 2018. Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data. Edisi 1. Yogyakarta : Andi Publisher. Hlm 31. ISBN: 978-979-29-7024-1
- Mantra, I.B. 1992. Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa ke Kota di Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada. Hlm : 42
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Hlm:20
- Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Refika Aditama. Hlm:313
- Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons. 2009. Engineering Optimization Theory and Practice, Fourth Edition. p:1
- Siringoringo, Hotniar. 2005. Riset Operasional Seri Pemrograman Linear. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm : 4
- Sita Dewi, Dwi Listyowati, Bertha Elvy Napitupulu. 2015. DAMPAK EKONOMI DARI MIGRASI: KASUS DI INDONESIA. STIE Jayakarta. Hlm : 8
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm : 142
- Winardi, (1999). Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem. Bandung : Mandar Maju. Hal :363
- Zudan Arif fakrulloh dan Endar Wismulyani. 2019. Tertib Administrasi Kependudukan, (Cempaka Putih, 2019), hlm. 2.

B. JURNAL

- Ali, M.A., 2014,. "*Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda, Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis*". Hlm : 2, 23, 49.
- Aldila Marselli*, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina. 2016. *UPAYA PENATAAN DAN PENERTIBAN DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 5, Nomor 3. Hlm : 11

C. PENELITIAN SEBELUMNYA

1. Sudarsono CF, Priyadi PB. 2019. *ANALISIS RENDAHNYA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENDUDUK NON PERMANEN (SKPNP) PADA MAHASISWA (STUDI DI KECAMATAN TEMBALANG)*. Dipublikasikan oleh Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
2. Robo T, Nuri A R, Robo S. 2019. *Analisis Migrasi Penduduk Terhadap Tingkat Pendapatan Ekonomi Masyarakat Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan*. Dipublikasikan oleh PANGEA 1(1):29

